KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Puan: Selidiki Alih Fungsi Lahan
Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

KARHUTLA

Puan: Selidiki Alih Fungsi Lahan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak digelar penyelidikan mengenai dugaan alih fungsi lahan di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pasalnya, karhutla telah menimbulkan berbagai persoalan, mengganggu lingkungan dan kehidupan masyarakat.

"Hal-hal yang terkait karhutla, kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak terkait untuk menyelidiki hal itu. Itu seharusnya tidak boleh terjadi, harus segera diselidiki," kata Puan seusai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah provinsi sejak Januari dan areanya meluas drastis pada Agustus 2026. Karhutla di antaranya melanda Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Saat karhutla belum sepenuhnya teratasi, muncul dugaan alih fungsi lahan. Di sejumlah lokasi yang sebelumnya terbakar terlihat pohon kelapa sawit sudah tertanam.

Puan mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran hutan. Namun, hal yang juga mendesak adalah pengusutan terhadap alih fungsi lahan yang diduga terjadi di tengah kebakaran. Penyelidikan penting dilakukan karena karhutla telah menimbulkan banyak persoalan, mulai dari penyakit saluran pernapasan akibat asap hingga gangguan pada pendidikan anak-anak.

Diminta maksimal

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtera Banong, meminta pemerintah bekerja maksimal dalam menyelidiki kebakaran hutan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam karhutla.

"Pak Presiden juga menyampaikan, jika ada yang dianggap melanggar, ya, tentu harus ditindak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku," kata Bahtera yang juga juru bicara Partai Gerindra.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam, Senin (7/9), Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum mengungkap para pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk mengusut dugaan kesengajaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan. Presiden meminta agar para perusahaan yang diduga terlibat untuk diselidiki dan diserahkan kepadanya.

Kapolri juga telah menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, polisi telah menetapkan 138 tersangka. Selain itu, terdapat delapan korporasi yang tengah diproses.

Bukan hanya itu, Kementerian Kehutanan telah memberikan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Kalimantan

[Bersambung ke hlm 15 kol 1-2]

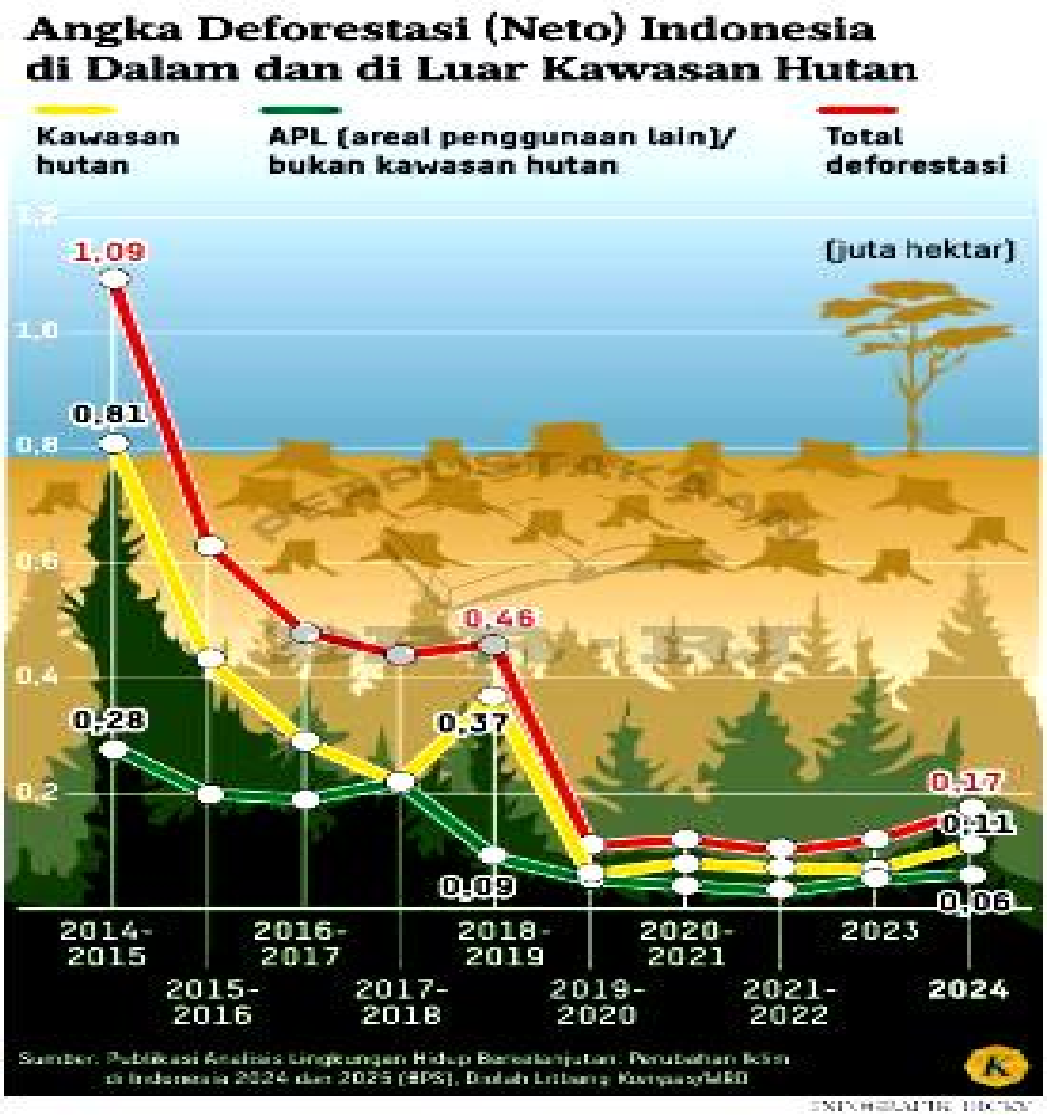
Angka Deforestasi (Neto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan
Kawasan hutan
APL (areal penggunaan lain)/ bukan kawasan hutan
Total deforestasi
(juta hektar)
1,09
0,81
0,46
0,28
0,37
0,09
0,17
0,11
0,06
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2023
2024
Sumber: Publikasi Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Perubahan Iklim di Indonesia 2024 dan 2025 (BPS), Diolah Litbang Kompas/MRD

Puan: Selidiki Alih Fungsi

(Sambungan dari halaman 1)

Barat lantaran di area konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Total lahan yang terbakar di area perusahaan tercatat 2.568,7 hektar.

Kelima perusahaan itu adalah PT Mahkota Rimba Utama di Kabupaten Ketapang dengan luas area terbakar 1.275,87 hektar, area PT Hutan Ketapang Industri di Ketapang terbakar 670,76 hektar, area PT Mayawana Persada Mas di Ketapang terbakar 326,93 hektar, area PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau terbakar 247,3 hektar, dan area PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau terbakar 47,84 hektar.

Atasi dampak karhutla

Tanpa mengabaikan upaya yang telah dilakukan pemerintah, Puan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengatasi saat kebakaran melanda. Hal yang juga penting adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang muncul akibat karhutla.

"Masalah kebakaran itu tidak hanya bagaimana mengatasi yang sekarang, tetapi apa yang harus kita atasi setelahnya. Bagaimana terkait masalah sosial, pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat," tutur Puan.

Sementara itu, upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan. Pemerintah juga mendapatkan bantuan dari sejumlah negara sahabat. Pemerintah Jepang, misalnya, mengirimkan tiga helikopter CH-47 Chinook untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Ketiga helikopter itu akan tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada Rabu (9/9).

"Jepang akan memberikan dukungan berupa tiga helikopter CH-47 Chinook yang memiliki kemampuan untuk mendukung operasi *water bombing*," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Tri Budi Utomo di Jakarta, Selasa.

Tri melanjutkan, dalam pengoperasian ketiga helikopter tersebut, Jepang juga mengerahkan 180 personel yang terdiri dari kru dan unsur-unsur pendukung lain. Adapun ketiga helikopter tersebut diangkut ke Kalimantan menggunakan kapal JS Kunisaki dengan sekitar 150 awak kapal.

(DYT/BTG/JOL)